

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1 Gambaran Umum

Kota Ambon merupakan Ibukota Provinsi dari Maluku. Asal Kota Ambon bermula dari zaman penjelajah asal Portugis yang sempat datang ke Kepulauan Maluku, kemudian lambat laun muncul sebuah perkampungan dan berkembang yang diberi nama Kota Ambon. (Kompas.com, 2/12/2021)

Menurut Survey Tata Guna Tanah tahun 1980, Kota Ambon memiliki luas daratan 359,45 km<sup>2</sup> dan luas lautan 17,55 km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 98 km. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979, wilayah administratif Kota Ambon memiliki luas 377 km<sup>2</sup> atau 2/5 dari luas Pulau Kota Ambon. Secara Geografis Kota Ambon terletak pada 3° 34' 8,40" – 3° 47' 42,00" Lintang Selatan dan 128° 1' 33,60" – 128° 18' 3,60" Bujur Timur. (Kota Ambon.go.id)

Kota Ambon memiliki lima kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Leitimur Selatan, Teluk Kota Ambon Baguala, Teluk Kota Ambon, dengan tiga puluh desa atau negeri dan dua puluh kelurahan di dalamnya.

Sebagaimana seperti tabel 4.1 di bawah ini:

Tabel 4.1 Kelurahan, Desa dan Negeri-Negeri Di Wilayah Pemerintah Kota Ambon

No.	Subsistem	Kecamatan				
		Nusaniwe	Sirimau	Leitimur Selatan	Baguala	Teluk Kota Ambon
1.	Kelurahan	1. Nusaniwe 2. Benteng 3. Wainitu	1. Waihoka 2. Karang Panjang		1. Lateri	1. Tihu

		Kudamati 4. Mangga Dua 5. Urimessing 6. Waihaong 7. Seilale	3. Batu Meja 4. Batu Gajah 5. Ahusen 6. Honipopu 7. Uritetu 8. Rijali 9. Amantelu 10. Pandan Kasturi			
2.	Desa		1. Galala		1. Waiheru 2. Nania 3. Negeri Lama 4. Latta	1. Wayawe 2. Poka 3. Hunuth/ Durian Patah
3.	Negeri	1. Latuhalat 2. Seilale 3. Nusaniwe 4. Amahusu 5. Urimessing	1. Soya 2. Batu Merah 3. Hative Kecil	1. Naku 2. Kilang 3. Hukurila 4. Ema 5. Hatalae 6. Hukumuri 7. Rutong 8. Leahari	1. Passo 2. Halong	1. Laha 2. Tawiri 3. Hative Besar 4. Rumah Tiga

Sumber : Andreas Pandiangan, (2021) "Transformasi Sangiri Negeri di Kota Ambon Mewujudkan Representatif Partisipatoris-Deliberatif" hal. 240, dalam Yustina.Trihoni. Nalesti Dewi & Antonius, M. Laot Kian. 2021. "Membangun Kota Inklusif Sebuah Antologi", Depok: PT. Rajagrafindo Persada.

Tabel 4.1 di atas membahas tentang 5 kecamatan yang ada di Kota Ambon, berbeda dengan subsistem pada umumnya yang menggunakan kelurahan saja, Kota Ambon tidak hanya mengelola kelurahan saja, tetapi ada desa dan juga negeri. Dengan masing-masing jumlahnya 20 kelurahan, 8 desa dan 22 negeri (Andreas, 2021: 241).

Kota Ambon sendiri dipimpin oleh seorang walikota, yaitu Richard Louhenapessy, SH., yang telah menjabat dari tahun 2011 hingga 2016 dan 2017 hingga 2022 (Kota Ambon.go.id).

Dilihat dari segi masyarakatnya, Kota Ambon biasa disebut sebagai kota pendatang, karena terdapat berbagai macam masyarakat yang datang dan menetap.

Baik masyarakat dari kota sekitar Kota Ambon maupun kota-kota lain di Indonesia. Bertambahnya penduduk yang kian ramai, membuat Kota Ambon menjadi kota multikultur. Adat dan budaya yang dibawa oleh para pendatang, membuat penduduk di Kota Ambon harus berbaur dengan satu sama lain. Perbedaan ini menjadi warna tersendiri bagi Kota Ambon untuk terciptanya keharmonisan di dalamnya (Pariella, 2020: 172).

Namun dalam kenyataannya dalam setiap kota multikultur, di mana banyak terdapat perbedaan, maka ada kemungkinan terdapat suatu kepentingan di dalamnya. Kepentingan ini dapat berpotensi menimbulkan konflik di Kota Ambon sendiri. Hal ini terbukti dari konflik-konflik yang pernah terjadi di Kota Ambon (Pariella, 2020: 172).

Konflik besar di Kota Ambon pernah terjadi pada tahun 1999, yang biasa disebut konflik Maluku. Konflik Maluku merupakan konflik kejahatan, kerusuhan hingga pelanggaran HAM. Konflik ini menyebabkan rusaknya harta benda, penderitaan korban hingga kematian. Bahkan tercatat dalam sejarah, konflik ini merupakan konflik terkelam dan berskala besar yang pernah terjadi di Indonesia (Indrawan, 2019: 12). Tidak hanya berhenti pada tahun itu, konflik ini berlanjut, namun mereda saat terjadinya kesepakatan perjanjian perdamaian malino pada tanggal 13 Februari 2002 antar komunitas Kristen dan muslim (Indrawan, 2019: 25).

Selanjutnya pada tahun 2008 hingga 2009, terjadi ketersinggungan antar etnis yang mengakibatkan konflik antar kelompok pemuda Batu Gantung Depan

dengan kelompok pemuda Batu Gantung Ganemo. Kemudian, terjadi kembali konflik pada tahun 2010 di Batu Merah, yang melibatkan dua kelompok pendukung tim sepakbola yang saling melempar karena pihak pendukung lainnya merasa terganggu saat diadakan konvoi. Selanjutnya, konflik di Kota Ambon terjadi pada tahun 2011. Konflik ini dipicu dari meninggalnya seorang tukang ojek, yang memicu spontanitas warga untuk melakukan baku hantam dengan batu dan senjata tajam. Akhirnya konflik ini mengakibatkan kerusakan harta benda serta korban jiwa (Pariella, 2020: 62-67).

Kerusuhan ini terjadi tepatnya pada tanggal 11 September 2011, di kawasan Tugu Trikora. Kerusakan ini tidak dapat di cegah oleh aparat terkait, karena warga sudah lebih dulu tersulut emosi, merasa ada yang janggal terhadap pernyataan polisi, bahwa korban meninggal karena kecelakaan. Sebab didapati warga, motor korban dalam keadaan baik-baik saja. Sehingga kerusuhan yang melibatkan 2 kelompok masyarakat ini terjadi begitu saja (Jpnn.com, 12/09/2011).

Pernyataan bahwa, Kota Ambon memiliki banyak perbedaan di dalam penduduknya, menjadi warna tersendiri bagi Kota Ambon untuk terciptanya keharmonisan, tidak menjamin akan selalu terjadi keharmonisan di dalamnya. Terbukti dari beberapa konflik yang peneliti paparkan, tergambar bahwa Kota Ambon rawan akan terjadinya konflik. Jika interaksi tidak dijalankan dengan baik, maka peristiwa konflik akan susah dihindari (Pariella, 2020: 3). Dari beberapa konflik tersebut, peneliti mengambil fokus konflik pada tahun 2011 untuk dibahas lebih lanjut.

## 4.2 Konflik

Kerusuhan di Kota Ambon tahun 2011 sendiri termasuk ke dalam konflik yang muncul kembali setelah adanya konflik serupa yang juga terjadi di bulan Desember akhir pada tahun 1999 (Nainggolan, 2012: 164). Sehingga peneliti akan menggunakan kata konflik dalam pembahasan analisis. Sedangkan dalam pemberitaan *online* yang peneliti gunakan, menyebutkan bahwa kejadian di Kota Ambon tahun 2011 merupakan sebuah kerusuhan, maka dalam pemaparan data, peneliti akan menggunakan kata kerusuhan.

Dalam konflik Kota Ambon tahun 2011 yang peneliti bahas, peneliti menggunakan 16 sumber pemberitaan *online*, untuk merangkai kronologi kejadian seperti pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2 Pemberitaan kerusuhan di Ambon tahun 2011

No.	Tanggal	Judul Berita	Sumber Berita
1.	11 September 2011	Ambon dilaporkan Tegang	Antara News
2.	12 September 2011	Polisi Mengatakan Situasi Ambon Relatif Terkendali	BBC New Indonesia
3.	13 September 2011	Keadaan di Kota Ambon masih mencekam	BBC New Indonesia
4.	14 September 2011	Konflik Ambon Karena Ketidaksihapan Aparat dan Intelijen	Berita Satu
5.	12 September 2011	Ambon Membara, 1 Meninggal 68 Luka-luka	Jpnn
6.	19 September 2011	Bentrok Kota Ambon masih misteri, Komnas HAM turun tangan	Okezone
7.	12 September 2011	TNI Tak Perlu Ikut dalam Pengamanan Rusuh Kota Ambon	Kompas.com
8.	11 September 2011	Kronologi Kerusuhan Kota Ambon	Kompas.com
9.	11 September 2011	Polisi Buru Provakator Kerusuhan Kota Ambon	Tribunnews
10.	12 September 2011	Polri: Tukang Ojek Tewas Kecelakaan	RiauPos.co

11.	12 September 2011	Mabes Polri : Kerusuhan Ambon dipicu Sms Provokator	Rmol
12.	12 September 2011	Buntut Kerusuhan, Kota Ambon Lumpuh	Tempo.co
13.	11 September 2011	Kematian Tukang Ojek Diduga jadi Pemicu Kerusuhan Ambon	Tribunnews
14.	11 September 2011	TNI Kerahkan Panser untuk Amankan Kota Ambon	Tribunnews
15.	11 September 2011	Aparat TNI dan Polri Bersenjata Lengkap Berjaga di Kota Ambon	Okezone
16.	12 September 2011	Kerusuhan Kota Ambon Pecah Akibat Polisi Lambat Bertindak	Tribunnews

Sumber : Observasi peneliti pada pemberitaan media *online* antara news, bbc news, jpnn, rmol, tribun news, berita satu, tempo.co, riaupos.co, kompas.com, okezone.

Dari 16 sumber tersebut, peneliti menjabarkan kronologi kejadian dari kerusuhan Kota Ambon tahun 2011 sebagai berikut:

1. Sabtu, 10 September 2011, awal mula terjadinya kerusuhan di Kota Ambon tahun 2011, disebabkan meninggalnya seorang pria tukang ojek pada malam hari , bernama Darmin Saiman, warga Kelurahan Waihaong Kecamatan Sirimau. Para warga menganggap Darwin meninggal dunia akibat dibunuh ketika hendak mengantarkan penumpangnya ke arah Kawasan Gunung Nona, Kudamati, Kecamatan Nusaniwe.
2. Minggu, 11 September 2011, polisi bertindak dengan melakukan otopsi untuk mengungkap kebenaran dibalik kematian Darwin. Kadiv Humas Mabes Polri Irjen menyatakan bahwa, hasil otopsi menunjukan Darwin mengalami kecelakaan murni. Menurutnya, awalnya Darwin menabrak pohon dan menabrak rumah warga yang bernama Okto, kemudian Darwin dibawa ke rumah sakit dan dinyatakan meninggal.

Namun telah beredar kabar melalui sms, yang menyatakan korban beragama Islam meninggal bukan karena kecelakaan melainkan dibunuh oleh kelompok Kristen, seorang warga juga mengungkapkan bahwa kendaraan milik korban tidak ada yang rusak. Menurut warga pernyataan dari polisi tidak dapat dipercaya setelah warga mendengar kabar lain dan menemukan kejanggalan, sehingga terjadilah spontanitas dari pihak keluarga dan warga yang emosi menjelang korban dimakamkan di Kawasan Petak Sepuluh.

Puncak dari kejadian ini, terjadilah aksi kerusuhan di Kawasan Tugu Trikora, Kota Ambon, warga saling menyerang dengan batu dan senjata tajam. Kerusuhan ini mempengaruhi lalu lintas di ruas jalan Trikora, Petak Sepuluh dan Batu Gantung, polisi meminta warga untuk tidak melewati kawasan ini, seperti pada gambar 4.1 di bawah ini.



Gambar 4.1. Kerusuhan di Kota Ambon aksi lempar batu  
Sumber : jpn.com (12/09/2011)

Akibat dari kerusuhan ini, 7 orang tewas, 65 orang terluka, 2 mobil dan 4 sepeda motor hangus dibakar massa, serta sekitar 200 bangunan rusak. Di

kawasan Batugantung Waringin, tercatat bahwa ratusan rumah warga hangus terbakar, warga menyelamatkan diri dengan keluar rumah dan berlari ke jalan. Banyak juga warga yang akhirnya memilih untuk mengungsi ke rumah saudara atau ke tempat yang lebih aman.

Kerusuhan tahun 2011 ini sempat didokumentasikan berupa video amatir yang diambil oleh seseorang pria di tengah-tengah kerusuhan berlangsung, seperti pada gambar 4.2, 4.3 dan 4.4 di bawah ini:



Gambar 4.2. Kerumunan warga di depan Umah Kopi Trikora  
Sumber : Channel youtube rotterdam (1/02/2012)



Gambar 4.3. Dua kelompok warga saling lempar batu  
Sumber : Channel youtube rotterdam (1/02/2012)





Gambar 4.4. Seorang polisi berdiri saat kerusuhan  
Sumber : Channel youtube rotterdamage (1/02/2012)

Pada gambar 4.2 hingga 4.4, terlihat ketegangan kerusuhan Kota Ambon tahun 2011, baku tembak, lemparan batu, teriakan dari warga sangat terdengar jelas. Pada gambar 4.4, terdapat satu polisi yang berdiri di pinggir jalan melihat jalannya aksi bentrok kedua kelompok dalam video yang berdurasi 6 menit 7 detik tersebut. Hingga menjelang akhir video, kerusuhan masih tetap berlanjut. Video amatir ini diunggah di sosial media youtube dengan akun bernama rotterdamage.

Masih pada tanggal 11 September 2011, tepatnya pada siang hari, seorang warga juga melihat TNI terjun langsung ke lokasi dengan menerjunkan 4 panser menuju perbatasan untuk mengamankan kondisi sekitar.

3. Pada hari Senin tanggal 12 September 2011, juru bicara Kepolisian Daerah Maluku AKBP Yohanes Huwae mengungkapkan bahwa Kota Ambon dalam keadaan relatif aman pasca kerusuhan. Aparat polisi sudah tersebar di daerah yang rawan terjadi konflik, hal ini dilakukan untuk melakukan pencegahan konflik terjadi kembali, terutama di Kawasan Trikora, Gereja Silo, dan daerah Mangga Dua. Meskipun situasi mulai kembali membaik, warga yang tinggal di

daerah-daerah terjadi kerusuhan, sebagian memilih untuk tetap mengungsi ke rumah kerabat yang lebih aman.

Pertokoan, sekolah, tempat perbelanjaan sementara juga masih ditutup, Barikade jalan di beberapa titik juga masih belum dibuka. Angkutan umum, juga belum terlihat di terminal. Situasi ini menggambarkan bahwa warga masih takut akan situasi kerusuhan yang dapat terulang kembali.

Selain itu, Kadiv Humas Mabes Polri, Bahrul Alam juga menyampaikan bahwa nomor-nomor penyebar sms yang berisi kabar tidak jelas, telah terlacak, tetapi pihaknya belum dapat menyampaikan siapa saja pemilik dari nomor-nomor tersebut.

4. Selanjutnya pada Rabu, 14 September 2011, kondisi di Kota Ambon mulai kembali normal. Terlihat kantor maupun pertokoan sudah mulai buka dan melakukan aktivitas seperti semula. Begitu juga dengan angkutan kendaraan umum sudah mulai beroperasi kembali. Meskipun keadaan sudah mulai kembali normal, penjagaan dari pihak kepolisian masih tetap dilaksanakan.
5. Pada Senin, 19 September 2011, polisi mulai melakukan olah TKP untuk mengetahui kebenaran dari kasus kerusuhan ini, tetapi masih belum melakukan penetapan tersangka.

**Analisis** dari kronologi konflik Kota Ambon tahun 2011, konflik ini masuk kedalam konflik jenis internal/horizontal, di mana konflik jenis ini melibatkan antar kelompok di dalam satu wilayah. Sesuai dengan konflik yang terjadi di Kota Ambon tahun 2011. Konflik ini melibatkan 2 kelompok yang saling

berhadapan melempar batu dan baku tembak hingga mengakibatkan korban jiwa, serta konflik ini juga terjadi di satu wilayah, yaitu di kawasan Tugu Trikora, Kota Ambon.

**Kesimpulan** dalam analisis ini adalah konflik yang melibatkan 2 kelompok masyarakat ini terjadi di Kawasan Tugu Trikora, Kota Ambon. Konflik ini tergolong ke dalam konflik jenis internal/horizontal, di mana dalam konflik melibatkan antar kelompok dalam 1 wilayah yang sama.

#### **4.3 Manajemen Krisis**

Konflik di Kota Ambon tahun 2011 dapat dikatakan sebuah krisis, karena di dalamnya menimbulkan dampak negatif, antara lain kerugian, hingga jatuhnya korban jiwa. Sejalan dengan pernyataan Firsan Nova yang menyebutkan bahwa, suatu peristiwa dapat dikatakan krisis, ketika sebuah informasi, peristiwa atau kejadian yang terjadi dapat berdampak negatif terhadap lingkungan organisasi (Nova, 2011: 2).

Pada penelitian ini peneliti akan berfokus pada penanganan yang dilakukan oleh kepolisian, TNI dan BIN (Badan Intelijen Negara) baik saat krisis konflik Kota Ambon tahun 2011 terjadi maupun pasca krisis.

##### **4.3.1 Tahap Krisis**

Tahap saat krisis dalam konflik Kota Ambon tahun 2011 adalah, saat di mana konflik tersebut mulai terjadi dan tidak terkontrol atau tidak dapat ditangani oleh pihak berwenang, yang akhirnya mengakibatkan dampak negatif bagi masyarakat Kota Ambon sendiri.

Penanganan yang dilakukan polisi saat kerusuhan terjadi yaitu, pada tanggal 11 September 2011, di mana kerusuhan terjadi, kepolisian tidak bergerak cepat dan cekatan. Sehingga amukan dari massa tidak dapat dicegah. Menurut pemberitaan media *online* yang peneliti ambil dari [Tribunnews.com](http://Tribunnews.com) (12/09/2011), pernyataan dari Koordinator Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras, Haris Azhar bahwa, polisi tidak hadir saat kerusuhan berlangsung dan selama berjam-jam masyarakat merasa gelisah karena tidak adanya tindakan dari polisi. Polisi juga dilihat tidak dapat membaca gelagat dari masyarakat yang merasa resah saat berita tidak jelas melalui SMS berkembang.

Dalam video yang diunggah oleh akun [karodalnet](http://karodalnet) (11/09/2011) di *youtube*, dengan judul “Kota Ambon Rusuh (September 2011)”, memperlihatkan berita dari media liputan petang yang membahas tentang kerusuhan Kota Ambon dengan judul berita “Kota Ambon Kembali Membara”. Dalam liputan tersebut, dikatakan bahwa Kapolres Pulau Kota Ambon AKBP Joko Susilo yang datang langsung ke tempat kejadian tidak dapat menenangkan amukan warga. Polisi juga mengeluarkan beberapa kali tembakan untuk menghalau massa, namun kerusuhan juga tidak kunjung reda. Dalam liputan juga disebutkan, bahwa warga kecewa terhadap lambannya polisi dalam menangani dan menangkap pembunuh tukang ojek.

Kemudian penanganan yang dilakukan pihak TNI yaitu, membantu pihak kepolisian dalam mengamankan wilayah terjadinya kerusuhan, dengan menurunkan 4 panser menuju ke daerah perbatasan Waringin ([Tribunnews.com](http://Tribunnews.com), 11/09/2011).

Sedangkan yang dilakukan pihak Badan Intelijen Negara atau BIN terkait kerusuhan Kota Ambon 2011, tidak tertulis secara jelas dan rinci dalam pemberitaan *online* yang peneliti temukan. Ini sehubungan dengan Peraturan Badan Intelijen Negara Republik Indonesia nomor 01 tahun 2022, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Intelijen Negara, dalam bab 1 pasal 4 bagian i menyebutkan bahwa, BIN berwenang untuk menetapkan klasifikasi rahasia intelijen dan pada UU tentang BIN pasal 18 bagian b, setiap Personel Intelijen Negara wajib merahasiakan seluruh upaya, pekerjaan, kegiatan, sasaran, informasi, fasilitas khusus, alat peralatan dan perlengkapan khusus, dukungan, dan/atau Personel Intelijen Negara yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi dan aktivitas Intelijen Negara. Sehingga peneliti tidak dapat menemukan pemberitaan atau data terkait penanganan BIN secara jelas. Sehingga hasil pemeriksaan, tindakan maupun analisa dari BIN terkait konflik Kota Ambon 2011, tidak dapat diketahui oleh khalayak umum secara jelas.

Analisis pada penanganan tahap krisis yang dilakukan polisi, TNI dan BIN, tidak dapat dikatakan berhasil, karena bila dilihat dari sisi pemberitaan *online*, penanganan yang dilakukan polisi, TNI dan BIN tidak cepat, sehingga yang tadinya konflik bisa saja dicegah, tetapi berujung tidak terkontrol. Analisis ini didukung dengan pernyataan-pernyataan dari pihak-pihak lain sebagai berikut:

Dalam pemberitaan *online* beritasatu.com (14/09/2011), John Pieris selaku anggota DPD Maluku juga menyatakan bahwa aparat penegak hukum dan intelijen terlambat menyadari kemungkinan terjadinya konflik, John Pieris menilai BIN (Badan Intelijen Negara) dan Polri yang paling bertanggung jawab atas terjadinya

peristiwa ini. Kinerja dari kedua pihak harus dievaluasi, karena pemerintah sudah kerap kali ceroboh akan kasus-kasus serupa. Dalam diskusi yang ada di Gedung DPD, John Pieris menyatakan bahwa, konferensi pers seharusnya dilakukan polisi untuk klarifikasi dengan cara *running text* televisi lokal secara berulang kali, namun sudah terlambat.

Panser TNI yang dikerahkan saat kerusuhan juga dinilai terlalu berlebihan, disusul dengan tembakan-tembakan yang dilepaskan, hal ini malah mengingatkan pada peristiwa konflik yang terjadi 10 tahun lalu. Aparat yang diterjunkan ke lapangan terlalu banyak, penanganan yang berlebihan ini membuat suasana di Kota Ambon semakin mencekam.

John Pieris juga menyinggung operasi dari badan intelijen yang kurang dilibatkan dalam peristiwa ini, padahal seharusnya petugas intelijen bergerak cepat searah jarum jam.

Komnas HAM juga sempat berkomentar tentang penanganan dari pihak kepolisian yang dianggap lambat dalam menangani kerusuhan ini, padahal kerusuhan ini dapat dicegah sebelum timbulnya korban jiwa. Komnas HAM menganggap bahwa, pihak polisilah yang bertanggung jawab untuk mengantisipasi agar peristiwa ini tidak terjadi (News.okezone.com, 19/09/2011).

Seperti yang disampaikan juga oleh mantan Perwakilan Komnas HAM Maluku, Benny Sarkol (lampiran 2, hal b)

“Jadi peristiwa itu berdasarkan dari dokumen yang kami peroleh, itu ada semacam indikasi kuat kalau boleh dibilang kegagalan aparat, baik kepolisian, TNI untuk

mengantisipasi isu-isu, yang saya pikir menurut dugaan kami, bahwa intel itu kurang professional, artinya kurang optimal, sehingga bisa terjadi.”

Selanjutnya masih terkait penyelidikan Komnas HAM, terdapat perbedaan antara investigasi Komnas HAM dengan pernyataan Mabes Polri terkait korban yang meninggal dunia. Seperti yang disampaikan oleh mantan Perwakilan Komnas HAM Maluku, Benny Sarkol (lampiran 2, hal b)

“Sekilas yang dapat saya sampaikan, pernyataan Mabes Polri bahwa, korban meninggal karena laka lantas itu bertolak belakang dengan hasil investigasi Komnas HAM, mungkin secara detailnya saya tidak bisa jelaskan di sini, karena ini sangat riskan. Saya harap anda memahami. Kenapa saya bisa mengungkapkan hanya segini, karena di Komnas HAM sendiri memiliki SOP, pemberian informasi, dokumen, data, itu kami tidak bisa membuka ke publik, karena setiap dokumen milik Komnas HAM, itu adalah rahasia negara.”. Terlihat dari hasil penyelidikan Komnas HAM bahwa hasil penyelidikan Komnas HAM dan pernyataan pilisi terkait penyebab kematian korban berbeda. Namun peneliti tidak dapat menanyakan lebih lanjut, sebab dari pihak Komnas HAM Maluku sendiri memilih untuk tidak mempublikasikan hasil investigasinya.

Dari pernyataan mantan Perwakilan Komnas HAM Maluku, Benny Sarkol bahwa, hasil penyelidikan Komnas HAM Maluku tidak dapat dipublikasi, karena termasuk dokumen rahasia. Sehingga peneliti memiliki keterbatasan yaitu, peneliti tidak dapat mengetahui dan menjabarkan hasil penelitian tersebut dalam penelitian ini.

Dapat dilihat dari pendapat KontraS, Komnas HAM dan DPD, menyatakan bahwa penanganan polisi, TNI dan BIN lamban dan disebut gagal, bahkan TNI dinilai tidak tepat, karena dengan kemunculannya membawa senjata lengkap, malah membuat warga panik dan situasi semakin mencekam. Padahal bila aparat jeli melihat tanda-tanda dan indikasi dari masyarakat, konflik dapat dicegah. Selain itu menurut mantan Kepala Perwakilan Komnas HAM Maluku, bahwa hasil investigasi dari Komnas HAM berbeda dengan pernyataan kepolisian terkait penyebab korban meninggal dunia. Namun untuk hasil dari investigasi Komnas HAM tidak dapat disebutkan, karena bersifat rahasia. Sehingga dapat dikatakan manajemen krisis yang dilakukan polisi, TNI dan BIN saat krisis gagal.

Kesimpulan dalam tahap krisis, dengan adanya pernyataan dari pemberitaan media *online* yang menampilkan pendapat DPD, Komnas HAM dan KontraS, menunjukkan bahwa pihak polisi, TNI dan BIN tidak melaksanakan penanganan dengan tepat saat krisis terjadi, sehingga masyarakat Kota Ambon mengalami kerugian besar pada saat itu. Dibakarnya rumah, kerusakan harta benda, korban luka-luka hingga korban jiwa menjadi hal yang tidak terhidarkan saat krisis terjadi. Selain itu terdapat perbedaan pernyataan dari pihak polisi dan Komnas HAM terkait penyebab korban meninggal dunia. Hal ini menjadi tanda tanya besar bagaimana kinerja polisi saat itu.



#### 4.3.2 Tahap Pasca Krisis

Disebut sebagai pasca krisis, ketika konflik di Kota Ambon sudah mulai mereda, atau masa di mana tahap krisis telah dilewati dan masuk dalam masa upaya pemulihan seperti keadaan semula.

Dalam penanganan yang dilakukan polisi, TNI dan BIN pada tahap pasca krisis kerusuhan Kota Ambon 2011, sebagai berikut:

Pada tanggal 11 September 2011, Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Bachrul Alam, di Mabes Polri, Jakarta mengatakan bahwa, polisi menargetkan provokator penyebar sms supaya tidak mengirimkan pesan-pesan yang berisi kebohongan dan memanas-manasi masyarakat.

Meskipun pada tanggal 12 September 2011, keadaan Kota Ambon sudah relatif aman, pihak kepolisian tetap melakukan penjagaan di lapangan, guna mencegah terjadinya perkelahian kembali antar kelompok warga. Daerah Trikora, Gereja Silo, dan Mangga dua masih dijaga oleh polisi, hal ini dinyatakan oleh Kepolisian Daerah Maluku AKBP Yohanes Huwae (BBC.com, 12/09/2011).

Selain itu Brimob Polda Maluku atau yang datang dari Makassar dan Jawa Timur melakukan menyekatan di masing-masing tempat agar kedua kelompok masyarakat tidak saling bertemu, sebagai bentuk sistem penjagaan dan keamanan yang diterapkan polisi (BBC.com, 13/09/2011).

Kemudian pada Senin, 19 September 2011, polisi juga mulai melakukan olah TKP untuk mengetahui kebenaran dari kasus kerusuhan ini, tetapi masih belum melakukan penetapan tersangka.

Tertulis dalam pemberitaan *online*, bahwa ratusan TNI maupun Polri, telah siap bersenjata lengkap melakukan pengamanan ekstra di kawasan pasca kerusuhan, seperti di jalan AM Sangadji, kawasan Mangga Dua, Batu Gantung, Pohon Pule dan kawasan Pardes. Dengan menurunkan 3 mobil panser guna membrikade jalan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kerusuhan terjadi kembali. Menurut pantauan yang dilakukan tanggal 11 September 2011 malam hari, aparat masih berada dipusat terjadinya kerusuhan (Okezone.com. 11/09/2011).

Dalam pemberitaan *online*, penanganan dari BIN tidak ditemukan oleh peneliti.

Analisis, pada tahap pasca krisis ini menunjukkan bahwa penanganan kepolisian, TNI dan BIN relatif mulai tertata untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait konflik Kota Ambon 2011, agar tidak hanya menemukan pemicu konflik saja, namun akar permasalahan juga dapat segera ditemukan dan dibantas serta kasus serupa tidak terjadi kembali di Kota Ambon. Hal ini dapat dilihat dari pendapat pihak lainnya, saat melihat penanganan polisi, TNI dan BIN pasca konflik sebagai berikut:

Dalam menangani konflik yang ada di Kota Ambon pada tahun 2011, Komnas HAM melakukan penyelidikan dengan dikirimnya tim ke Kota Ambon saat pasca kerusuhan dan menghasilkan temuan bahwa, kerusuhan ini terjadi karena provokasi dari pihak-pihak tertentu dengan kepentingan yang tidak jelas. Diduga juga, provokator tidak terima dengan penyelesaian konflik yang pernah terjadi di Kota Ambon tahun 1999 silam (Republika.co.id, 14/09/2011). Hal ini sejalan

dengan pernyataan dari mantan Perwakilan Komnas HAM, Benny Sarkol ( lampiran 2, hal b)

” Situasi 2011 itu memang Maluku kisruh, penjelasan polda maupun pemerintah, sudah aman, tetapi pasca konflik 1999 kan masih trauma bagi warga Kristen maupun Muslim. Sehingga menurut penilaian publik, mengarah pada indikasi dikondisikan (diprovokasi), supaya terjadi konflik lagi. Sehingga Komnas HAM mempertimbangkan dan menganalisa pikiran publik, maka Komnas HAM memutuskan untuk tidak *merelease* hasil dari investigasi itu”. Dalam arti, pihak dari Komnas HAM melihat bahwa, penilaian publik tentang konflik Kota Ambon 2011 dibuat dengan sengaja oleh pihak tertentu, sehingga untuk meminimalisir terjadinya konflik lagi, hasil akhir penyelidikan Komnas HAM tidak *direlease* secara publik.

Pada Laporan Tahunan Komnas HAM tahun 2011, terdapat kasus-kasus penting selama tahun 2011 yang harus segera ditangani oleh perwakilan Komnas HAM Maluku dan kasus-kasus ini bersifat mendesak. Konflik Kota Ambon 2011 menjadi salah satu kasus yang masuk ke dalam catatan kasus mendesak. Konflik Kota Ambon 2011 pada buku laporan disebut sebagai bentrok Kota Ambon, sehingga dalam pembahasan laporan tahunan Komnas HAM 2011, peneliti akan menggunakan kata bentrok.

Pada tanggal 13 hingga 16 September 2011, Komnas HAM sudah melaksanakan investigasi tentang peristiwa bentrok warga yang terjadi di Kota Ambon dan dalam investigasi tersebut Komnas HAM menjumpai adanya

kejanggalan. Dari semua hasil yang sudah diperoleh melalui investigasi, Komnas HAM menemukan adanya indikasi pelanggaran HAM, karena pihak kepolisian dinilai melakukan pembiaran dalam kasus ini. Sehingga Komnas HAM memberikan rekomendasi yaitu, harus segera dilakukannya penyelidikan oleh pihak kepolisian Daerah Maluku untuk menindak oknum dan menyelesaikannya sesuai dengan aturan hukum, kemudian dalam mekanisme pengawalan aparat harus memperhatikan aspek psikologi masyarakat dan yang terakhir, untuk Polda Maluku dalam melaksanakan penyelesaian kasus pelanggaran hukum tetap mempertimbangkan aspek HAM atau Hak Asasi Manusia (Laporan Tahunan Komnas HAM Tahun 2011).

Pemberitaan *online* Kompas.com (12/09/2011), Koordinator Kontras, Haris Azhar mengungkapkan TNI sebaiknya tidak dilibatkan dalam penanganan kerusuhan Kota Ambon 2011, cukup dari pihak kepolisian saja. Kedatangan TNI dengan diperlengkapi senjata dan kendaraan taktis, membuat situasi serta kondisi kerusuhan semakin mencekam dan hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi masyarakat sekitar. Seharusnya untuk menciptakan situasi damai saat itu, polisi melakukan pendekatan persuasif kepada masyarakat, agar keadaan yang sudah berangsur kondusif tidak memanas kembali.

Terakhir, dari pemberitaan *online* pada Tribunnews.com (12/09/2011), anggota DPR Komisi I. Helmy Fauzi, menyatakan bahwa, seharusnya badan intelijen menyerahkan informasi akurat kepada eksekutif supaya kebijakan dapat diambil secara proporsional serta tepat. Pengumpulan informasi terkait kerusuhan di Kota Ambon 2011 tetap harus dijalankan BIN meskipun kerusuhan sudah

mereda. BIN harus dapat menganalisis apakah munculnya kerusuhan ini akibat dari sisa konflik yang lalu atau wujud frustrasi masyarakat.

Kesimpulan, berdasarkan dari data serta analisis yang peneliti paparkan, dalam penanganan pasca konflik, aparat terkait mulai bergerak melakukan penyelidikan dan melakukan pertemuan untuk menganalisa lebih lanjut permasalahan serta solusi yang dapat diterapkan kedepannya di Kota Ambon.

#### **4.4 Pemangku Kepentingan**

Dalam pembahasan pemangku kepentingan, peneliti akan memaparkan 3 pemangku kepentingan dalam kerusuhan Kota Ambon tahun 2011, yaitu kepolisian, TNI dan BIN.

##### **4.4.1 Kepolisian**

Peran polisi dalam kerusuhan Kota Ambon 2011 terlihat mencolok. Pada pemberitaan *online*, banyak yang menyebutkan, bahwa pihak polisi yang paling bertanggung jawab dalam hal ini. Penanganan yang dilakukan polisi saat kerusuhan antara lain:

1. Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam memberikan informasi dengan mengungkapkan bahwa, setelah beredar kabar bahwa pria tukang ojek meninggal dunia, dilakukan otopsi oleh rumah sakit, hasil menunjukkan bahwa korban murni kecelakaan dan polisi menyampaikan hasil tersebut kepada warga (Kompas.com, 11/09/2011).

2. Saat kerusuhan terjadi, Kapolres Pulau Kota Ambon AKBP Joko Susilo datang ke tempat kejadian untuk menenangkan massa, hingga beberapa kali mengeluarkan tembakan, namun kerusuhan tetap berlanjut (Youtube : karodanlet, 11/09/2011).
3. Pasca kerusuhan tepatnya pada tanggal 11 September 2011, Kadiv Humas Polri, Irjen (Pol) Anton Bachrul Alam, di Mabes Polri Jakarta, memberi informasi kepada masyarakat melalui media dengan mengatakan bahwa, polisi menargetkan provokator penyebar sms supaya tidak mengirimkan pesan-pesan yang berisi kebohongan dan memanas-manasi masyarakat.
4. Di tanggal 12 September 2011, keadaan Kota Ambon sudah relatif aman, pihak kepolisian tetap melakukan penjagaan di lapangan, guna mencegah terjadinya perkelahian kembali antar kelompok warga. Daerah Trikora, Gereja Silo, dan Mangga dua masih dijaga oleh polisi, hal ini dinyatakan oleh Kepolisian Daerah Maluku AKBP Yohanes Huwae.
5. Brimob Polda Maluku melakukan penyekatan di masing-masing tempat agar kedua kelompok masyarakat tidak saling bertemu, sebagai bentuk sistem penjagaan dan keamanan yang diterapkan polisi.
6. Kemudian pada Senin, 19 September 2011, polisi juga mulai melakukan olah TKP untuk mengetahui kebenaran dari kasus kerusuhan ini, tetapi masih belum melakukan penetapan tersangka.

Analisis dari penanganan yang dilakukan Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Anton Bachrul Alam, Kapolres Pulau Kota Ambon AKBP Joko

Susilo, Kepolisian Daerah Maluku AKBP Yohanes Huwae, Brimob Polda Maluku saat konflik terjadi maupun pasca konflik, masuk ke dalam pemangku kepentingan jenis primer, di mana polisi terlihat terjun langsung ke lapangan, berdiri bersama masyarakat untuk memberi keamanan disaat situasi konflik terjadi dan memberikan berita terkini juga kepada media, untuk menghimbau masyarakat terkait konflik maupun pasca konflik. Meskipun beberapa pihak lainnya menilai polisi lambat dalam mengantisipasi konflik.

Kesimpulan dari penjelasan tentang penanganan polisi yang terjun langsung ke tempat konflik dan memberi informasi kepada awak media, memperlihatkan polisi sebagai pemangku kepentingan primer yang terjun langsung dan merasakan kondisi serta situasi konflik saat itu.

#### 4.4.2 TNI

Selanjutnya penanganan yang dilakukan TNI saat kerusuhan terjadi yaitu, TNI bersenja lengkap melakukan pengamanan ekstra di kawasan pasca kerusuhan, seperti di jalan AM Sangadji, kawasan Mangga Dua, Batu Gantung, Pohon Pule dan kawasan Pardes. Dengan menurunkan 3 mobil panser guna membrikade jalan. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya kerusuhan terjadi kembali.

Analisis, dilihat dari penanganan yang dilakukan TNI, TNI masuk ke dalam pemangku kepentingan jenis primer, sama halnya dengan polisi, TNI juga terlihat terjun langsung ke lapangan dengan persenjataan lengkap, untuk menenangkan massa, bahkan pasca krisis TNI bersama polisi juga tetap melakukan penjagaan

tempat terjadinya konflik, meskipun menurut pendapat pihak lain, TNI sama terlambatnya dengan polisi dan bahkan penanganannya dinilai kurang tepat.

Kesimpulan, dari penanganan yang dilakukan TNI selama krisis maupun pasca krisis, masuk ke dalam pemangku kepentingan jenis primer.

#### 4.4.3 Badan Intelijen Negara (BIN)

Terakhir, pada penanganan yang dilakukan BIN, tidak peneliti temukan dalam pemberitaan *online*, namun dengan melihat pendapat yang dinyatakan oleh:

1. Komisi I DPR Mahfudz dalam bidang keamanan akan mengundang Kepala BIN yaitu Susanto pada tanggal 13 September 2011, untuk dimintai penjelasan terkait kondisi serta analisa BIN terhadap peristiwa kerusuhan Kota Ambon 2011.
2. John Pieris juga menyinggung operasi dari badan intelijen yang kurang dilibatkan dalam peristiwa ini, padahal seharusnya petugas intelijen bergerak cepat.

Analisis, berdasarkan pemaparan data yang didapat peneliti, terdapat dua pendapat yang menyatakan bahwa BIN memegang peranan penting dan memang seharusnya BIN ikut andil dalam menangani konflik Kota Ambon 2011. Bila dilihat dari penanganan yang harusnya dilakukan BIN, BIN masuk ke dalam pemangku kepentingan jenis primer, di mana dalam jenis ini BIN menyelidiki dan menganalisa adanya masalah yang tidak beres di balik konflik Kota Ambon 2011, yang nantinya hasil temuan dari BIN akan dipertanggungjawabkan pada Komisi I DPR Mahfudz dalam bidang keamanan.



Kesimpulan, terlihat dari pendapat pihak lain tentang penanganan BIN saat konflik maupun pasca konflik, memperlihatkan bahwa BIN memegang peranan penting sebagai pemangku kepentingan primer dalam konflik Kota Ambon tahun 2011.

